

Strategi Pembangunan Kekuatan TNI di Natuna Utara Dalam Menghadapi Konflik Laut Cina Selatan (LCS)

TNI Strength Development Strategy in North Natuna in Facing the South China Sea (SCS) Conflict

Nopriadi ¹⁾ *, Herly Dwiyanto ²⁾ & Danuri ³⁾

1) Sekolah Staf dan Komando TNI, Indonesia

2) Universitas Pertahanan Republik Indonesia

3) Sekolah Staf dan Komando TNI, Indonesia

Diterima: 26 September 2024; Direview: 02 November 2024; Disetujui: 26 November 2024

*Corresponding Email: 9945nopriadi@gmail.com

Abstrak

Ketegangan di kawasan Asia-Pasifik semakin meningkat akibat tindakan agresif Republik Rakyat China (RRC) terkait klaim Laut Cina Selatan (LCS). Kondisi ini mendorong negara-negara di kawasan untuk memperkuat kapasitas pertahanan, didukung oleh keterlibatan Amerika Serikat dan pembentukan pakta AUKUS yang memunculkan *security dilemma*. Sebagai negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan kekuatan pertahanan nasionalnya. Tantangan tersebut mencakup: (1) alokasi anggaran pertahanan yang masih rendah, kurang dari 1% PDB, meskipun luas wilayah dan ancaman maritim sangat signifikan; (2) fokus anggaran yang lebih dominan pada pengembangan personel dibandingkan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan penelitian teknologi pertahanan; dan (3) ketidakkonsistenan dalam perencanaan pengadaan alutsista yang dipengaruhi faktor politik domestik maupun internasional. Dalam konteks ini, diperlukan strategi pertahanan nasional yang dapat berperan sebagai penyeimbang kekuatan (*balance of power*) di kawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, berdasarkan data primer (wawancara) dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia dipengaruhi oleh situasi VUCA, kondisi geografis, dan visi pembangunan Indonesia-sentris. Strategi Pertahanan Nusantara (SPN) yang dirumuskan Kementerian Pertahanan dan TNI memprioritaskan Strategi Pulau-Pulau Besar serta pengembangan pangkalan aju di Natuna untuk merespons agresi RRC di LCS.

Kata Kunci: Strategi; Pembangunan Kekuatan; Pertahanan

Abstract

Tensions in the Asia-Pacific region have escalated due to the aggressive actions of the People's Republic of China (PRC) regarding its South China Sea (SCS) claims. This situation has prompted regional countries to enhance their defense capabilities, further complicated by the involvement of the United States and the formation of the AUKUS pact, which has created a security dilemma. Indonesia faces several challenges in building its national defense capacity as a non-party to the direct conflict. These challenges include: (1) a relatively low defense budget allocation, less than 1% of GDP, despite its vast territory and significant maritime threats; (2) a budget focus skewed towards personnel development rather than modernizing primary weapons systems and investing in defense technology research; and (3) inconsistencies in defense procurement planning due to domestic and international political factors. To address the potential escalation of the SCS conflict, Indonesia requires a national defense strategy that can act as a balance of power in the region. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, utilizing primary (interviews) and secondary data. The findings reveal that VUCA conditions, geographical challenges, and an Indonesia-centric development vision influence Indonesia's defense strategy. The Archipelago Defense Strategy (SPN), formulated by the Ministry of Defense and the Indonesian Armed Forces (TNI), prioritizes the Large Islands Strategy and the development of forward bases in Natuna to counteract the PRC's aggression in the SCS.

Keywords: Strategy; Defense Development; National Defense

How to Cite: Nopriadi, Dwiyanto, H., & Danuri., (2024), Strategi Pembangunan Kekuatan TNI di Natuna Utara Dalam Menghadapi Konflik Laut Cina Selatan (LCS). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 7(2): 848-857.



PENDAHULUAN

Stabilitas keamanan suatu negara diukur dari kebijakan pertahanan dan keamanan negara dalam strategi, doktrin hingga postur pertahanan. Jaminan keamanan suatu negara merupakan salah satu perhitungan bagi suatu negara untuk melakukan kerja sama (politik, budaya, ekonomi, hingga pertahanan). Aspek pertahanan dalam kehidupan bernegara merupakan aspek penting untuk menjamin keberlangsungan hidup bernegara. Dalam upaya tersebut, sejak berdirinya Republik Indonesia, bangsa Indonesia telah menghadapi agresi militer, upaya memecah belah bangsa, pemberontakan, hingga perebutan wilayah.

Saat ini, perkembangan situasi kawasan di Asia memanas akibat klaim yang dilakukan oleh China pada wilayah perairan Laut Cina Selatan (LCS). Menurut Saputra et al., (2024), klaim yang dilakukan mencapai 90 persen perairan LCS berdasarkan sembilan garis putus-putus (the nine-dash line) yang saat ini menjadi sepuluh garis putus-putus (the ten-dash line). Berdasarkan klaim sepihak tersebut, memunculkan protes dari Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunai Darussalam. Menurut (Darajati & Adolf, 2018) klaim yang dilakukan oleh China menyeret negara-negara yang berkepentingan dalam geopolitik dan geoekonomi di LCS, seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India.

Sementara itu, Prabowo (2013) mengungkapkan konflik LCS berkaitan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan pertahanan negara pengklaim. Secara politik, menguasai seluruh wilayah LCS akan memberikan daya tawar politik yang tinggi kepada negara yang menguasainya. Hal tersebut tentu akan berdampak pada ekonomi, dimana LCS memiliki kandungan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi. Sedangkan dalam bidang pertahanan, negara yang menguasai LCS akan mendapatkan keuntungan strategis karena LCS merupakan penghubung antara Selat Malaka dan kawasan Asia Timur. Menurut Li dan Chang, (2019) disamping posisi strategis, LCS juga menyimpan warisan bawah laut yang besar (underwater cultural heritage) dan China juga berusaha membangun jalur sutera maritime (21st century maritime silk road).

Peran strategis tersebut, mendorong China untuk melakukan manuver dengan membangun naval base di LCS ataupun tempat-tempat lain, yang difungsikan sebagai command, control and communication untuk mendukung operasi militer. China mereklamasi gugusan Kepulauan Spratly dengan fasilitas pangkalan militer yang kokoh, berjarak 400 mil laut dari Pulau Natuna. Selain itu, pembangunan pangkalan militer juga didirikan di Kamboja (Silhanokville), Argentina, Myanmar, Tajikistan, dan Djibouti Saputra et al., (2024).

Dalam beberapa kajian, Indonesia tidak tergolong didalam claimant state atas sengketa di LCS. Akan tetapi, terjadi tumpang tindih antara ten-dash line dengan Zona Ekonomi Eksklusif pada Laut Natuna Utara. Atas dasar tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan peta baru NKRI 2017, dengan menambahkan penamaan baru Laut Natuna Utara yang sebelumnya Laut Cina Selatan. Langkah tersebut diambil sebagai pertunjukan kedaulatan diplomatik dan politik Indonesia pada perairan nasional, serta sebagai bentuk perlawanan halus terhadap ekspansi China pada sepuluh garis putus-putus china Muhaimin (2018). Selain itu, Pemerintah telah membangun pangkalan militer di kepulauan Natuna yang digunakan sebagai sikap perlawanan dari meningkatnya eskalasi konflik dan agresivitas China dalam klaim LCS (Manullang & Lumbantoruan, 2022).

Wicaksono (2023) mengungkapkan bahwa klaim atas wilayah LCS, telah melahirkan kekhawatiran negara pengklaim dan non-pengklaim disekitarnya, serta negara luar kawasan atas kontrol, stabilitas, dan keamanan wilayah perairan. Kekhawatiran yang meningkat di kawasan kemudian memicu ketegangan-ketegangan yang didominasi oleh manuver-manuver militer, upaya unjuk kekuatan, serta provokasi dan intimidasi. Perilaku agresif dan provokasi yang ditampakkan oleh China di wilayah LCS melahirkan sengketa wilayah yang terus meningkat dan mengarah pada terciptanya konflik skala rendah (low intensity conflict), dengan potensi konflik yang bisa lebih meluas dengan intensitas tinggi (high intensity conflict). Mengingat agresivitas China dalam upaya klaim LCS, maka dibutuhkan strategi khusus dalam pembangunan kekuatan pertahanan dalam menghadapi situasi yang dapat berubah dan berkembang setiap saat (Rizaldi et al., 2023; Wibowo et al., 2023).

Menurut Anugerah (2021) strategi penangkalan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia masih belum efektif dalam menghadapi konflik LCS. Kondisi eksisting menunjukkan bahwa respon Pemerintah Indonesia masih bersifat reaktif-reaksioner terhadap insiden yang kerap terjadi di perairan Natuna Utara, baik dalam konteks militer ataupun non-militer. Pemerintah Indonesia masih banyak bermain di bilik-bilik diplomasi dengan mengedepankan nota protes diplomatik kepada Pemerintah China atas pelanggaran kedaulatan yang telah dilakukan. Pendekatan militer yang dilakukan Pemerintah dalam memperkuat wilayah pertahanan khususnya di Natuna Utara juga dinilai belum optimal karena keterbatasan jumlah personel, keterbatasan alat transportasi dan sistem persenjataan untuk melakukan naval presence, patroli reguler, serta pengintaian terhadap wilayah laut yang cukup luas. Dengan kebijakan China yang semakin agresif di LCS (termasuk Laut Natuna Utara), akan meningkatkan intensitas aksi koersif dengan asumsi negara-negara claimant tidak cukup berani untuk menempuh konfrontasi militer secara terbuka dengan China yang menyebabkan konflik akan semakin berlanjut dan meluas.

Disisi lain, Indonesia dalam pembangunan kekuatan pertahanan menghadapi permasalahan, diantaranya: (1) kebijakan anggaran pertahanan yang relatif kecil dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia yang luas dengan banyaknya selat-selat yang memiliki potensi ancaman (masih di bawah 1 persen dari PDB); (2) prosentase anggaran pertahanan masih menitikberatkan pada pembangunan personel dibandingkan dengan modernisasi alutsista, penelitian dan pengembangan, ToT (Transfer of Technology), anggaran perbaikan dan perawatan, dll; (3) adanya ketidakkonsistenan perencanaan pengadaan alutsista yang dipengaruhi oleh faktor politik, baik dalam ataupun luar negeri. Pengaruh kebijakan yang memiliki kecenderungan terhadap produk dan spesifikasi tertentu menjadikan proses pengadaan yang sudah direncanakan dan telah berjalan harus mengikuti kebijakan baru. Sedangkan faktor politik luar negeri seperti ancaman embargo yang dilakukan oleh negara-negara produsen alutsista akibat kondisi tertentu. Untuk itu, dalam menghadapi ancaman konflik LCS yang sewaktu-waktu bisa menjadi konflik yang meluas akibat agresifitas RRC di LCS dan hambatan-hambatan yang telah diuraikan sebelumnya. Dibutuhkan strategi pembangunan kemampuan pertahanan nasional yang menjadi 'setidaknya' penyeimbang kekuatan (balance of power) di kawasan, atas ancaman yang dilakukan oleh China tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait strategi pembangunan kekuatan pertahanan TNI di Natuna, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat pembangunan kekuatan pertahanan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembangunan kekuatan pertahanan TNI di Natuna dalam kesiapan menghadapi konflik di LCS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Peneliti memulai dengan mengidentifikasi masalah atau pertanyaan yang akan diteliti dan mengembangkan rasionalitas, dengan mengkerangkai pertanyaan penelitian berdasarkan pengalaman, observasi, dan tinjauan penelitian yang relevan. Kemudian peneliti melanjutkan dengan menetapkan subyek dan obyek penelitian untuk dilakukan pendalaman (wawancara, observasi, dan studi literatur). Pemilihan informan ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kewenangan yang berdasarkan fenomena penelitian, yakni pembangunan kekuatan pertahanan TNI di Natuna dalam menghadapi konflik LCS. Adapun subyek penelitian terdiri dari: Dirjen Straha Kemhan RI, Dirjen Kuathan Kemhan RI, Asops Panglima TNI, Asrenum Panglima TNI, Kapusjianstralitbang TNI, Asrena Kogabwilhan I, dan Asops Kogabwilhan I. Penelitian dilakukan di kedua lembaga tersebut (Kementerian Pertahanan RI dan Mabes TNI), sebagai Kementerian/Lembaga yang berwenang dalam pertahanan. Setelah pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian, maka peneliti menggunakan pengolahan data menggunakan software Nvivo 12, yang diharapkan mampu memberikan kajian yang komprehensif dan memiliki keabsahan serta kehandalan data. Tahapan selanjutnya, peneliti melakukan analisis data dengan pendekatan interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi eksisting pembangunan kekuatan TNI di Natuna dalam menghadapi konflik di LCS

Tindakan-tindakan agresif yang dilakukan oleh RRC, menurut Kuang et al., (2022) melahirkan masalah *security dilemma* yang terjadi di kawasan akibat pembangunan kekuatan militer RRC. Negara-negara yang tidak berkepentingan secara langsung (wilayah kedaulatan) pun turut terlibat seperti di wilayah Indo-Pasifik dan Uni Eropa membentuk kesepakatan perjanjian keamanan internasional yang dirangkum dalam AUKUS (Australia, United Kingdom, dan Amerika Serikat). Tujuan pakta keamanan tersebut tidak lain adalah untuk memperkuat Australia dalam menghadapi agresifitas RRC di kawasan.

Pembangunan kekuatan pertahanan TNI saat ini sangat diperlukan mengingat faktor ancaman yang datang tidak hanya datang dari luar, akan tetapi ada faktor internal yang hadir yang menghadirkan situasi VUCA. Sehingga pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia menjadi prioritas dikarenakan luasnya wilayah yang harus dilindungi dari situasi tersebut di atas. Sebagai salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia, wilayah yang harus dilindungi Indonesia mencakup 17.504 pulau, luas perairan 6.400.000 km² dan garis pantai 108.000 km (terpanjang kedua di dunia). Dengan wilayah perairan pedalaman dan kepulauan seluas 3.110.000 km², laut territorial 290.000 km², zona ekonomi eksklusif 3.000.000 km², dan landasan kontinen 2.800.000 km², membuat Indonesia menghadapi ancaman baik militer maupun nirmiliter (Saputra et al., 2024; Saraswati et al., 2024). Keberadaan pulau-pulau yang tersebar di seluruh penjuru nusantara pun menimbulkan celah-celah pada gugusan pulau.

Kondisi tersebut mengharuskan Indonesia membangun kekuatan postur pertahanan yang kuat berdasarkan kapabilitas (*capability-based defense*) yang diterjemahkan oleh pemerintah dalam program MEF. Pembangunan sumber daya organisasi TNI dalam menghadapi dampak segala ancaman yang datang dirancang dan dikembangkan berdasarkan perencanaan pembangunan umum kekuatan dan pengembangan kemampuan TNI. Pembangunan kekuatan pertahanan didasarkan pada perhitungan kekuatan dan kemampuan militer bakal calon lawan atau minimal kekuatan militer di kawasan sebagai acuan perimbangan kekuatan yang akan dibangun (*threat-based planning*) dan kemampuan anggaran (*budget-based planning*) yang dimiliki negara, sehingga keterbatasan sumber daya organisasi menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari serta akan bergantung kepada kebijakan pertahanan dan penyesuaian strategi pertahanan termasuk strategi militer. Pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia didasarkan pada analisis ancaman (*threat-based planning*) dan kemampuan anggaran (*budget-based planning*), sehingga strategi pertahanan harus disesuaikan dengan keterbatasan sumber daya dan kebijakan yang berlaku (NUGROHO, n.d.).

Berangkat dari hal tersebut di atas, Pemerintah melalui Kemhan RI dan TNI, mendorong pembangunan kekuatan pertahanan untuk dilakukan secara menyeluruh di setiap pulau-pulau besar dan gugusan pulau strategis, yang berpedoman pada cara pandang Indonesia centris. Hal tersebut kemudian diterjemahkan dalam bentuk Strategi Pertahanan Nusantara (SPN) sebagai kerangka acuan pembangunan kekuatan pertahanan nasional, dengan bersandarkan pada 5 (lima) pulau besar dan gugusan pulau-pulau strategis. Selain itu, dengan kondisi Negara kepulauan yang menghadirkan ancaman pada setiap selat-selat strategis. Maka untuk menyikapi hal tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) *choke point* dan 6 (enam) *flash point*, sebagai point mobilisasi ancaman yang berpotensi di *choke point*.

Wilayah kedaulatan yang begitu luas dimiliki oleh NKRI harus dipertahankan setiap jengkalnya oleh TNI yang berkekuatan tidak lebih dari setengah juta personel. Dalam menyikapi hal tersebut, TNI selaku pemegang komando pertahanan menyusun langkah-langkah penataan organisasi berdasarkan SPN. Berdasarkan Rencana Strategi TNI 2020-2024, capaian organisasi TNI terdiri dari:

Pembentukan 3 (tiga) Kotama Ops TNI di wilayah Timur di Sorong, yang terdiri dari Divif-3/Kostrad, Koarmada III, Koopsau III, dan Pasmars-3 yang memiliki tujuan untuk menghadapi ancaman yang diperkirakan datang dari wilayah Timur dan Selatan Indonesia;



1. Pembentukan STT Natuna yang ditujukan untuk mengantisipasi peningkatan eskalasi konflik di LCS, selain sebagai pangkalan aju bagi unsur-unsur TNI yang beroperasi di wilayah Utara Indonesia. Rencana pembangunan selanjutnya pembentukan STT di Saumlaki/Selaru, Morotai, Merauke dan Biak yang diperkirakan selesai pada 2029;
2. Pembentukan Koopssus TNI, sebagai Badan Pelaksana Pusat Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima. Koopssus ini bertugas untuk menyelenggarakan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah kedaulatan NKRI.
3. Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, II, dan III, yang bertugas untuk menyelenggarakan kampanye militer, operasi gabungan dan operasi lainnya;
4. Pembentukan Pusat Informasi Maritim (Pusinfomar) TNI yang memiliki tugas untuk memelihara dan meningkatkan keamanan maritime melalui komunikasi, koordinasi dan kolaborasi bersamaan dibidang pengumpulan, penyediaan dan pertukaran informasi.

Guna memantapkan strategi pertahanan nasional, saat ini Kogabwilhan melaksanakan penyiapan Renkon TNI OMP tahun 2025-2029. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya TNI untuk mengantisipasi segala macam kemungkinan yang muncul berupa ancaman militer baik dari dalam bentuk agresi maupun ancaman militer lainnya. Pembacaan skenario ancaman dilakukan berdasarkan kemungkinan terburuk yang datang dari beberapa aktor negara yang diperkirakan dapat menjadi bakal calon lawan dan akan dihadapi dengan menggelar kampanye militer dan operasi gabungan TNI. Hal tersebut, sebagai implementasi operasi militer untuk perang yang berpedoman pada SPN berupa strategi penangkalan di mandala luar dan mandala utama, strategi penindakan di mandala utama, mandala dalam, maupun pulau-pulau besar beserta gugusan kepulauan strategis disesuaikan dengan kebutuhan dan perimbangan kekuatan, termasuk strategi pemulihan (Ian Montratama et al., n.d.).

Menyikapi situasi konflik di LCS, pemerintah mendorong *major project* bidang pertahanan dan keamanan, dalam upaya penguatan keamanan di Laut Natuna. Pendirian STT Natuna merupakan upaya pembangunan kekuatan di wilayah utara Indonesia, untuk menjaga wilayah kedaulatan. Dalam rangka untuk mendukung STT Natuna, maka dibentuk dan ditetapkan daerah *supporting system* bagi STT Natuna. Daerah yang tersedia sebagai pendukung adalah TNI AD dengan Kodam I Bukit Barisan melalui Korem 31/Wira Pratama dan Kodam XII Tanjungpura di Pontianak, TNI AL dengan Lantamal IV Batam, TNI AU dengan Kopsud I yang membawahi Lanud Rosmin Nuejadin, Lanud Supadio, beserta alutsista yang menyertainya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Dalam bidang pembangunan SDM TNI, dilakukan mencakup peningkatan pelatihan, pendidikan, dan penempatan personel yang sesuai dengan kebutuhan taktis dan strategis. Diharapkan setiap diri personel memiliki kemampuan dalam bidang intelijen, kemampuan teknis yang tinggi, disamping ketahanan fisik yang unggul. Sedangkan dalam adaptasi sumber daya manusia (SDM), organisasi memberikan ruang adaptasi yang melibatkan pelatihan berkelanjutan, pembinaan, dan integrasi teknologi modern dalam operasi sehari-hari. Sehingga, diharapkan setiap personel TNI memiliki kecakapan terhadap teknologi yang digunakan. Terkait pembangunan SDM di STT Natuna dalam menghadapi konflik LCS, setiap personel diharapkan memiliki kemampuan: diplomasi, intelijen, pertahanan, keamanan, pembinaan teritorial dan kemampuan dukungan.

Sedangkan dalam Pembangunan kekuatan pertahanan bidang teknologi, pengadaan alutsista didasarkan pada pemenuhan MEF, dengan melihat kemampuan keuangan Negara. Modernisasi yang saat ini dijalankan melalui MEF merupakan upaya untuk menjamin kepentingan strategis nasional. Kemampuan keuangan Negara yang terbatas, mendorong Pemerintah untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan dan pembangunan alutsista yang disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan Negara. Dari segi kekuatan dan kemampuan, beberapa teknologi alutsista yang dipertimbangkan untuk mendukung tugas TNI, meliputi: teknologi kapal perang (klas frigat, korvet, KCR, patroli, hingga kapal selam serang); teknologi pesawat tempur dan pengintai (pesawat tempur multi guna, pesawat pengintai maritime, dan helikopter serang); teknologi sistem pertahanan udara (rudal permukaan ke udara/SAM, dan radar pertahanan

udara); teknologi pendukung tugas tempur dan artileri (MBT, IFV, dan artileri *self-propelled*); dan teknologi sistem C61STAR (*Command, Control, Communication, Computer, Cyber, Combat System, Intelligence, Target Acquisition and Reconnaissance*) dan NCW (*Network Centric Warfare*).

Temuan penelitian dari data sekunder, studi tingkat dependensi teknologi asing dan diversifikasi pemasok teknologi, jumlah inventori teknologi baru dan lisensi teknologi militer merupakan indikator teknologi pertahanan yang mempengaruhi posisi bersaing negara dalam dinamika persenjataan. Indonesia memiliki angka dependensi yang tinggi terhadap teknologi persenjataan militer, dengan kepemilikan senjata impor sebesar 86 persen dari total inventori alutsista yang dimiliki. Indonesia masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap teknologi persenjataan luar negeri pada seluruh kategori alutsista berdaya gentar tinggi, yakni: tank tempur, rampur, artileri, pesawat tempur, kapal selam, kapal perang laut, sistem operasi bawah laut, serta sistem peluncur rudal.

Kondisi eksisting pembangunan kekuatan pertahanan bidang anggaran, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam pemenuhan MEF. Berdasarkan temuan data primer dan sekunder, menyatakan hal yang sama. Kemampuan keuangan Negara untuk anggaran militer masih di bawah 1 (satu) persen dari PDB. Selain itu, selama perjalanan MEF, tidak pernah mencapai angka 100 persen pada tutup tahun anggaran. Pada program MEF tahap 3 (tiga), serapan anggaran baru mencapai angka 71 persen. Minimnya anggaran pertahanan pun berdampak pada perkembangan teknologi militer, yang lebih dari setengah anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Sehingga pengadaan dan pemangangan alutsista, serta industri pertahanan nasional tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan menuju investasi pertahanan. Di satu sisi, prosentase anggaran untuk penelitian dan pengembangan terlampau kecil untuk visi Negara yang besar.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat pembangunan kekuatan pertahanan

Faktor pendukung internal yang diperoleh peneliti dari proses wawancara dengan informan kunci menemukan bahwa pembangunan kekuatan TNI saat ini didukung penuh oleh pemerintah dengan komitmen tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan kebijakan pembangunan militer Indonesia (MEF) yang didukung secara konsisten oleh anggaran pertahanan yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Selain itu, untuk memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam menguasai teknologi militer dan mendorong hubungan baik dengan Negara produsen. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alutsista dari Luar Negeri (Supriyatno, 2014).

Berdasarkan penuturan salah satu informan, keinginan kuat untuk membangun kekuatan pertahanan ditunjukkan dengan adanya gagasan oleh Menteri Pertahanan untuk menggantikan program MEF yang akan berakhir pada tahun ini. Program pengganti yang digagas oleh Menhan RI tersebut ingin melihat kekuatan optimum, menggantikan MEF. Walaupun postur pertahanan saat ini sangat tergantung dengan politik anggaran dan kemampuan keuangan Negara, akan tetapi Menhan RI optimis jika anggaran pertahanan kedepannya akan mampu didorong untuk mencapai angka 1-2 persen dari PDB. Keinginan untuk mencapai kekuatan optimal menurut Menhan RI bisa dicapai dengan skema pinjaman ringan jangka panjang. Menurut Informan, ada 3 (tiga) Negara di Timur Tengah yang bersedia untuk melakukan skema (membiayai) pembangunana kekuatan optimum tersebut. Hal tersebut memperlihatkan bahwa, salah satu faktor pendukung internal pembangunan kekuatan pertahanan diperlihatkan oleh Kemhan RI dalam bidang diplomasi pertahanan.

Komitmen pembangunan kekuatan pertahanan terlihat dari keberhasilan beberapa program dalam bentuk *joint production* yang dilakukan dengan Negara sahabat. Keberhasilan-keberhasilan melakukan kerja sama tersebut tidak dapat dilepaskan dari kemampuan diplomasi para pemimpin bangsa. Walaupun tidak menutup kemungkinan, Negara-negara yang ingin bekerjasama dengan Indonesia memiliki kepentingan politik ataupun ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Faktor pendukung yang kemudian bisa dimaknai pula sebagai faktor penghambat adalah kondisi demografi Indonesia. Sebagai Negara kepulauan tentu menciptakan banyak selat-selat yang



mudah dilewati oleh armada tempur musuh. Akan tetapi disatu sisi, kondisi tersebut juga menjadi keuntungan tersendiri jika terjadi agresi dari Negara lain, tidak akan mampu dengan mudah menaklukkan Indonesia.

Sedangkan untuk faktor pendukung eksternal, keberadaan posisi geostrategis Indonesia memberikan keuntungan tersendiri. Keinginan para pihak yang berkepentingan tentu memaksa Negara-negara tersebut untuk bekerja sama dengan Indonesia. Dalam kasus konflik di LCS, Indonesia telah mengikat Negara-negara yang berkepentingan dalam bentuk hubungan *comprehensive strategic partnership* dengan RRC dan Amerika Serikat, serta Negara-negara di Asia Tenggara.

Faktor penghambat internal dalam penelitian ini, peneliti temukan bahwa kemampuan keuangan Negara yang masih rendah untuk belanja pertahanan masih tergolong rendah dibandingkan Singapura. Prosentase anggaran pertahanan yang masih di bawah 1 persen dari PDB, dapat menyebabkan daur hidup alutsista menjadi stagnan, bahkan mundur. Sedangkan untuk faktor penghambat eksternal dapat terlihat dari ketegangan yang terjadi di kawasan tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Akibatnya, masih terjadi perlombaan senjata di kawasan yang berpotensi memanas setiap saat. Selain itu, kondisi konflik di Rusia-Ukraina pun menyebabkan ekonomi global mengalami kemunduranyang berakibat pada kemampuan Negara membangun pertumbuhan ekonominya (Latupeirissa et al., 2023; Zulfa et al., 2022).

Strategi pembangunan kekuatan pertahanan TNI dalam menghadapi konflik LCS

Penentuan strategi pembangunan kekuatan pertahanan, pembacaan/analisis lingkungan strategis (anlingstra) menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Anlingstra menjadi faktor yang diperhitungkan untuk melihat ancaman yang dapat ditimbulkan bagi kedaulatan bangsa. Baik itu situasi konflik, ataupun kemampuan Negara lain dalam pembangunan kekuatannya.

Analisis tersebut kemudian dijadikan acuan perimbangan kekuatan yang dibangun (*threat-based planning*) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara (*budget-based planning*) yang dimiliki. Salah satu kelemahan dari pendekatan perencanaan seperti ini, kemampuan pertahanan Negara bergantung pada kemampuan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain pendekatan tersebut, analisis historis dan demografi yang ada menjadi faktor perhitungan. Dimana kemudian, Pemerintah melalui Kemhan RI dan Mabes TNI menyusun perencanaan pembangunan kekuatan TNI berdasarkan kondisi geografis dan kemampuan keuangan Negara yang diterjemahkan dalam SPN (Mustari et al., 2018).

Dalam SPN, strategi didasarkan pada keberadaan pulau-pulau besar dan gugusan pulau strategis, yang kemudian membagi wilayah operasi tempur/medan operasi menjadi 3 (tiga) mandala, yakni: Mandala Luar, Mandala Utama dan Mandala Dalam. Dengan mempersiapkan strategi penangkalan, penindakan dan pemulihan pada setiap mandala, beserta pemetaan 9 (sembilan) *choke point* dan 6 (enam) *flash point*, yang ditujukan untuk poit mobilisasi dalam menghadapi ancaman yang datang pada setiap *choke point*.

Pulau-pulau besar merupakan wilayah pertahanan terakhir, yang akan digunakan sebagai medan gerilya untuk mengurai kekuatan musuh secara perlahan. Sebagai pendukung strategi tersebut, dibentuk 5 (lima) Kogabwilhan yang ditujukan untuk menyelenggarakan kampanye militer, operasi gabungan dan operasi lainnya. Sebagai pertimbangan penting dalam pembangunan gelar kekatan TNI, dilaksanakan program pembangunan nasional (Wilayah Pengembangan Strategis/WPS sebanyak 35 WPS), dengan dukungan seluruh komponen bangsa. Sebagai satuan pendukung Kogabwilhan, dibentuk Satuan TNI Terpadu (STT) yang diawali STT Natuna sebagai pangkalan aju bagi unsur-unsur TNI yang beroperasi di wilayah Utara Indonesia. Rencana pembangunan selanjutnya pembentukan STT di Saumlaki/Selaru, Morotai, Merauke dan Biak yang diperkirakan selesai pada 2029.

Strategi yang telah ditetapkan tersebut tidak lain dilakukan oleh TNI, untuk mempertahankan kedaulatan negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melihat perkembangan situasi sebagaimana telah diuraikan pada kondisi eksisting, TNI melaksanakan Renkon TNI OMP tahun 2025-2029, guna mengantisipasi kemungkinan terburuk berupa ancaman militer baik dalam bentuk agresi maupun bentuk ancaman militer lainnya.

Kemungkinan skenario ancaman baik yang paling mungkin, maupun skenario yang paling berbahaya, dari beberapa aktor negara yang diperkirakan dapat menjadi bakal calon lawan dan akan dihadapi dengan menggelar kampanye militer dan operasi gabungan TNI sebagai implementasi operasi militer untuk perang yang berpedoman pada SPN.

Skenario untuk menyikapi sikap kondisi kawasan yang tidak menentu akibat sikap agresif RRC yang melakukan klaim sepihak terhadap kawasan LCS dengan menarik sepuluh garis putus-putus (*ten dash line*). Kemudian menarik kekuatan barat untuk menempatkan kekuatannya secara tidak langsung di sekitar kawasan, dengan menjadikan Australia sebagai boneka (AUKUS). Dengan demikian, konflik LCS secara tidak langsung telah menarik 2 (dua) kekuatan besar dunia untuk saling berhadapan di wilayah Asia-Pasifik.

Menyikapi hal tersebut, proses pengambilan keputusan dalam rangka menghadapi konflik LCS yang sewaktu-waktu bisa melebar dalam lingkup pertahanan militer telah dilaksanakan oleh TNI sesuai tataran. Pada tataran strategis militer, yaitu penyusunan Rencana Kontigensi TNI dalam rangka Operasi Militer untuk Perang (Renkon TNI OMP) sebagai langkah antisipatif TNI dalam menghadapi kontigensi ancaman militer perang dari aktor negara yang diperkirakan dapat menjadi bakal calon lawan selama kurun waktu 5 (lima) tahunan termasuk terkait kemungkinan konflik LCS dan dapat direvisi setiap tahunnya mengikuti dinamika perkembangan lingkungan strategis dan *update* perkiraan intelijen dan perkiraan ancaman jangka pendek. Renkon TNI OMP ini selanjutnya akan menjadi referensi untuk proses pengambilan keputusan militer pada tataran operasional yaitu Rencana Kampanye Militer (Renkammil) dan Rencana Operasi Gabungan (Renopsgab) TNI yang disusun oleh Kogabwilhan TNI. Untuk pengambilan keputusan di level taktis dilaksanakan oleh Pangkogasgab atau Dansatgas yang ditunjuk sesuai dengan direktif Komando Atas.

Selain catatan di atas, pada setiap matra mengembangkan organisasinya masing-masing seperti pembentukan divisi Kostrad di setiap pulau besar untuk TNI AD, pembentukan Koarmada-Lanal untuk TNI AL, dan pembentukan Komando Operasi Udara (Koopsud) untuk TNI AU, sebagai bentuk operasi kewilayahan. Kemudian untuk mendukung komponen utama, TNI melalui Kemhan RI saat ini sedang mengembangkan Komponen Cadangan (Komcad) yang dipersiapkan setiap tahunnya sebanyak 25.000 personel, dengan target 144.000 personel (288 satuan setingkat batalyon). Sedangkan Komponen Pendukung (Komduk) telah disiapkan berdasarkan UU PSDN.

Keberadaan pangkalan Natuna menjadi mandala pertahanan utama yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan strategi penangkalan dalam wujud *smart diplomacy*, operasi laut dan operasi udara, serta operasi TNI lainnya di wilayah perbatasan. Selain itu, keberadaan Kogabwilhan dan STT Natuna diberikan kewenangan untuk melaksanakan strategi penindakan (kampanye militer dan operasi gabungan) yang digelar untuk menghadapi kekuatan militer yang mengancam kedaulatan dan pertahanan Negara (Mardamsyah et al., 2022).

SIMPULAN

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, terutama di Natuna yang strategis, di tengah meningkatnya agresivitas RRC di Laut China Selatan (LCS). Untuk itu, pembangunan kekuatan pertahanan berbasis kemampuan (*capability-based defense*) menjadi prioritas. Strategi ini mencakup perencanaan ancaman (*threat-based planning*), pembangunan infrastruktur pertahanan, dan modernisasi alutsista melalui program MEF, meskipun terkendala anggaran terbatas dan ketergantungan pada teknologi impor. Pemerintah menunjukkan komitmen dengan mengembangkan kebijakan strategis seperti UU Industri Pertahanan dan diplomasi pertahanan yang aktif. Posisi geostrategis Indonesia juga menjadi faktor pendukung, memungkinkan kerja sama dengan negara lain. Namun, rendahnya anggaran pertahanan—kurang dari 1% PDB—dan ketegangan di kawasan tetap menjadi hambatan utama. Strategi pertahanan nasional diatur dalam Strategi Pertahanan Nusantara (SPN), yang mengelompokkan wilayah operasi ke dalam tiga mandala: luar, utama, dan dalam. Strategi ini melibatkan pembangunan infrastruktur seperti Kogabwilhan dan Satuan TNI Terpadu (STT), termasuk STT Natuna sebagai pangkalan utama untuk menghadapi eskalasi konflik di LCS. Selain itu, 9 choke points dan 6 flash



points dipetakan untuk menghadapi ancaman strategis. Pengembangan SDM TNI menjadi fokus utama, mencakup pelatihan berkelanjutan, adaptasi teknologi modern, dan penguatan kemampuan diplomasi, intelijen, serta pertahanan. Di bidang teknologi, modernisasi alutsista dilakukan berdasarkan kebutuhan strategis nasional, meskipun masih bergantung pada kerja sama internasional karena keterbatasan anggaran. Keseluruhan upaya ini bertujuan memperkuat strategi penangkalan, penindakan, dan pemulihan di wilayah strategis. STT Natuna menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan melalui pendekatan diplomasi, operasi militer, dan integrasi lintas matra, sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan nasional untuk menghadapi tantangan regional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, B. (2021). Penguatan Strategi Penangkalan Dalam Merespons Aksi Koersif Cina Di Laut Natuna Utara. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(02), 286–307.
- Darajati, M. R., & Adolf, H. (2018). Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1).
- Ian Montratama, S. E., MEB, M. S., & Begi Herstanti, S. H. (n.d.). *Troika-Kerja Sama Pertahanan India, Indonesia, dan Australia: Peluang dan Tantangannya Bagi Indonesia*. Jakad Media Publishing.
- Kuang, H., Akmal, Z., & Li, F. (2022). Measuring the effects of green technology innovations and renewable energy investment for reducing carbon emissions in China. *Renewable Energy*, 197, 1–10.
- Latupeirissa, C., Nau, N. U. W., & Seba, R. O. C. (2023). Analisis Konflik Rusia Ukraina dan Konflik Internal NATO Menggunakan Siklus Kausalitas. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 9424–9438.
- Manullang, G. H., & Lumbantoruan, G. M. (2022). RESPON INDONESIA MENGHADAPI ANCAMAN CINA DI LAUT NATUNA UTARA DI MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(1), 10–18.
- Mardamsyah, A., Wiranto, S., Sitorus, H., Hipdizah, H., Saptono, D., & Simatupang, H. (2022). Strategi Integrasi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Operasi Militer dalam Mendukung Kampanye Militer. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9), 3107–3114.
- Muhaimin, R. (2018). Kebijakan Sekuritisasi Dan Persepsi Ancaman Di Laut Natuna Utara [The Policy Of Securitization And Threat Perception In North Natuna Sea]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 9(1), 17–38.
- Mustari, B., Supartono, S., & Barnas, R. (2018). Strategi pertahanan laut nusantara dalam mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia. *Strategi Perang Semesta*, 4(2).
- NUGROHO, P. A. D. I. (n.d.). *OPTIMALISASI PERTAHANAN NEGARA DALAM MENGANTISIPASI ESKALASI KONFLIK DI LAUT CHINA SELATAN GUNA MENJAGA KEPENTINGAN NASIONAL*.
- Prabowo, E. E. (2013). KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERTAHANAN INDONESIA (Studi Kasus Konflik Di Laut Cina Selatan). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19(3), 118–129.
- Rizaldi, B. A., Sianipar, J. F., & Anwar, S. (2023). Peran Operasi Militer Dalam Mendukung Upaya Diplomasi dalam Pembebasan Irian Barat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2848–2858. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1749>
- Saputra, R. M., Somantri, G. R., Subroto, A., & Marsetio, M. (2024). Indonesian Maritime Diplomacy: Building Strategic Alliances for Sovereignty at Sea. *Jurnal Ad'ministrare*, 275–281.
- Saraswati, M., Marsetio, M., Rudiyanto, R., Widodo, P., Saragih, H. R. J., Kristijarso, K., & Suwarno, P. (2024). PERSPEKTIF MARITIM INDONESIA DALAM STRATEGI DIPLOMASI DAN KONEKTIVITAS JALUR LAUT. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(10), 4031–4041.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang ilmu pertahanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wibowo, D. E., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2023). Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3075–3088. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1744>
- Wicaksono, A. P. (2023). *Efektivitas Kebijakan Publik Agreement Pertahanan Indonesia-Tiongkok*.
- Zulfa, K. K., Arisanto, P. T., & Mahadana, K. R. (2022). Analisis Sanksi Ekonomi Terhadap Rusia Atas Invasinya di Ukraina 2022. *Jurnal Transformasi Global*, 9(2).